

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating

(Studi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan)

Irwan¹, Mursalim², Nurwanah³

¹Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

^{2,3}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

¹irwan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: menguji dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan teknik sampling jenuh, maka jumlah sampel penelitian diketahui adalah sebanyak 24 Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2016-2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Beraganda dan Uji Interaksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating tidak dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, sementara hasil uji moderasi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating dapat memoderasi dalam pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal tetapi berpengaruh negatif.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of: testing and analyzing the Effect of Regional Original Income (PAD) and Balancing Funds on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating Variable

This research was conducted in the Regency/City Government in South Sulawesi Province using saturated sampling technique, so the number of research samples is known to be 24 Regencies/Cities. This research was conducted for the period 2016-2020. The type of data used is secondary data and the data analysis technique used in this research is Multiple Regression Analysis and Interaction Test.

The results of this study indicate that regional original income and balancing funds have a positive and significant effect on capital expenditure, the results of the moderating test of economic growth as a moderating variable cannot be used as a moderating variable in the effect of regional original income on capital expenditure, while the results of the moderating test of economic growth as a variable moderating can moderate the effect of balancing funds on capital expenditures but has a negative effect.

Keywords: Regional Original Income, Balance Fund, Capital Expenditure, and Economic Growth.

PENDAHULUAN

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010). Pada dasarnya belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Menurut PSAP No. 2, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dan pelayanan berbagai sektor terutama sektor publik, karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

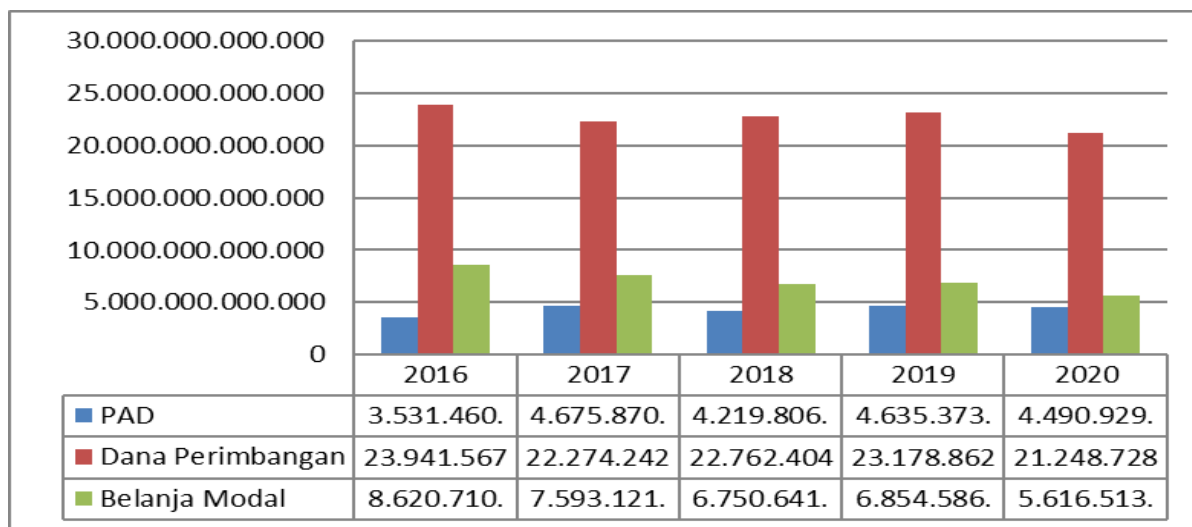
Pada tahun 2020 belanja modal memiliki persentase sebesar 17,37% dari total belanja pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan atau senilai Rp5,6 triliun. Dengan pentingnya pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana di daerah, maka seharusnya pemerintah dapat lebih mengutamakan alokasi anggaran dalam belanja modal daripada belanja barang maupun belanja pegawai.

Pada tahun 2019 lalu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Gubernur pada saat itu telah mencanangkan beberapa proyek pembangunan strategis agar menjadi contoh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat memprioritaskan belanja modal pada penyusunan APBD untuk anggaran tahun 2020. Karena seharusnya yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah adalah belanja modal. Sebab belanja modal akan berdampak pada pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 31 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [Anggi Afnisah \(2020\)](#) hasil penelitian menunjukkan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi terbukti dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh PAD dan DAK. Hasil penelitian serupa juga yang dilakukan oleh [Siti Dini dkk \(2021\)](#) hasil penelitian PAD secara terpisah memengaruhi bermakna bagi Belanja Modal dan DAU secara parsial memengaruhi bermakna bagi Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD pada Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Pengaruh DAU pada Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Erdi dan Rachmawati (Adapun data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja modal

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020, yakni sebagai berikut:



Gambar 1. Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Tahun 2016-2020

Berdasarkan data pada Gambar 1 di atas, rata-rata Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kurun waktu tahun 2016-2020 di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun adalah sebesar Rp4,31 triliun untuk realisasi PAD dan Rp22,68 triliun untuk dana perimbangan sedangkan realisasi belanja moda sebesar Rp7,08 Triliun dan jika di persentasekan adalah belanja modal hanya sebesar 21,93% dari total belanja daerah. Dari data ini terlihat alokasi belanja daerah masih sangat besar porsinya untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal, sehingga tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum menjadi prioritas sepenuhnya dari masing-masing daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

Perekonomian di suatu daerah didukung sarana prasarana publik dan infrastruktur melalui belanja modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum tercermin pada pendapatan per kapitanya. PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu daerah yaitu pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang yang juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan dalam kondisi baik ditengah persaingan global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan 3,56% pada kumulatif triwulan III-2020, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD dan Dana Perimbangan pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya meningkatkan PAD, DAU, DAK dan belanja modal [Jaeni & Anggana, \(2016\)](#).

Permasalahan belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, sehingga ke depan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah dalam alokasi APBD lebih besar porsinya untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Hal ini mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik [Musliadi, \(2013\)](#).

Berdasarkan latar belakang, data dan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating”.

Penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Husaeri Priyatna dan Jaya Purwadinata \(2017\)](#) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Namun dalam hal ini, peneliti bermaksud mengembangkan penelitian dengan menambahkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi dan lokasi berbeda serta obyek yang lebih luas yakni pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dan periode data penelitian yakni tahun 2016-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud (DJPk Kementerian Keuangan RI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Menurut [Siregar, \(2015\)](#) belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah "beban modal" sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal (1) angka 18 “pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut [Halim \(2007:96\)](#) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama.

Dana Perimbangan

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa: "Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi". Menurut [Djaenuri \(2012\)](#) "Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (*akuntabel*), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah [Adisasmita, \(2013\)](#). Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan dengan meningkatkan kapasitas produksi suatu negara [Haller, \(2012\)](#). Sedangkan [Sukirno \(2010\)](#) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsep penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah dana perimbangan) terhadap variabel dependen (belanja modal).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pada pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di ukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$PAD = PD + RD + PKD + LPDS$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PKD = Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

LPDS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan dapat di ukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$DP = DAU + DAK + DBH$$

Keterangan:

DP = Dana Perimbangan

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

3. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal dapat di ukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJII + BFL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tana

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJII = Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

BFL = Belanja Fisik Lainnya

4. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel in juga disebut dengan variabel independen kedua. Variabel moderasi dapat ditulis dalam "Z" Dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, yang di hitung dengan rumus:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelumnya

Untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang di hadapi, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah berupa skema atau gambar arah pemikiran yang menunjukkan hubungan antara masing-masing variabel yang akan dibahas.

Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Terhadap Belanja Modal” dimana sebagai variabel bebasnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebagai variabel terikat serta Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moerasi.

Hipotesis

Hipotesis menurut [Erlina dan Sri Mulyani \(2007: 41\)](#), menyatakan “Hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris”. Berdasarkan kerangka konseptual yang diuraikan di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H3 : Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal.

H4 : Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Perimbangan pada Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menganalisis data dalam bentuk angka-angka dengan prosedur statistika. Teknik penelitan ini menggunakan penelitian Kausal Komparatif (*Causal Comparative Research*), yang merupakan penelitian yang menganalisis hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel [Heryanti et al, \(2019\)](#).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan permohonan penelitian dan pengambilan data Laporan Realisasi Anggaran kabupaten dan kota se Sulawesi Selatan melalui email ke alamat ppid.djpk@kemenkeu.go.id selama bulan Januari hingga Februari 2022.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Kuantitatif

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil [Sugiyono \(2012: 8\)](#). Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari data-data yang di dapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b) Data Kualitatif

Berupa penjelasan dari para pembimbing karena dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah se Provinsi Sulawesi Selatan yang telah di publikasi dan di peroleh melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan data pertumbuhan ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan melalui website sulsel.bps.go.id

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui atau menjangring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian [Sujarweni \(2015:93\)](#). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari satuan-satuan individu yang memiliki karakteristik yang sama dan bersifat general [Sekaran dan Bougie, \(2017:53\)](#). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 24 Kabupaten dan Kota.

2. Sampel

[Sugiyono \(2012:81\)](#) mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2016-2020, dengan jumlah sampel sebanyak 24 daerah. Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 5 tahun x 24 Kabupaten dan Kota = 120 data pengamatan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu analisis regresi yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen) yang lebih dari satu. Analisis linier berganda dalam penelitian ini dipakai untuk menganalisis pengaruh Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi dengan menggunakan Uji Interaksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel penelitian yang ada yakni, data sekunder, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal dari

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016-2020 sehingga diperoleh 120 data pengamatan kemudian diolah menggunakan program SPSS.

Dari hasil olah data pengamatan, maka didapatkan hasil pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

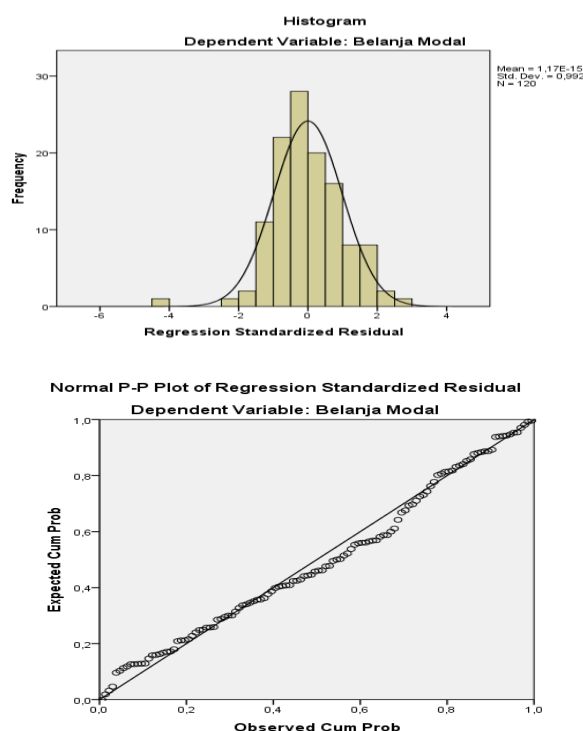
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	120	34,90	1337,23	179,6120	218,14880
Dana Perimbangan	120	555,22	1992,75	945,0484	264,05929
Belanja Modal	120	83,75	884,20	295,4631	118,73154
Valid N (listwise)	120				

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:



Gambar 4. P-P Plot

Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4 di atas hasil grafik histogram menyerupai gambar lonceng dan pada P-P Plot titik-titik yang bergerak searah dengan garis diagonal hal ini berarti bahwa data terdistribusi dengan normal. Kemudian untuk membuktikan uji normalitas ini dibuktikan dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test:

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	80,06566095
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,061
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,068 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 3 nilai signifikansi Test Statistic Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,68 di mana nilai tersebut > 0,05 sehingga bersesuaian dengan grafik histogram dan P- P Plot data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan yang sempurna antar variabel independen. Untuk dapat memperoleh hasil yang tidak bias, tidak boleh terdapat hubungan linier antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang kuat/sempurna antara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (variance Inflation Factor). Indikasi adanya multikolinearitas yaitu apabila VIF lebih dari 10. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	79,814	33,755		2,364	,020		
PAD	,202	,050	,371	4,047	,000	,463	2,160
Dana	,190	,041	,422	4,607	,000	,463	2,160
Perimbangan							

a. Dependent Variable: Belanja Modal

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke- t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi dinamakan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2). Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3). Jika d terletak antara dL dan dU atau antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan hasil uji autokorelasi pada data yang telah diolah:

Tabel 5. Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,738 ^a	,545	,537	80,74708	1,665

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 5. diatas, diperoleh nilai Durbin Watson 1,665 dengan N sebanyak 120 dan jumlah variabel independen ($k=2$) sebanyak 2, maka dU sebesar 1,7361. Pengambilan keputusan dengan ketentuan $4-dU < d < 4-dL$, maka hasilnya $2,2639 < 1,665 < 2,3316$. Dasar Pengambilan keputusan nilai d terletak antara dU dan $(4 - dU)$ dan dL ($4 - dL$), maka tidak menghasilkan keputusan apa-apa atau tidak pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada gejala heteroskedastisitas di dalam model penelitian ini. Jika terdapat gejala heteroskedastisitas maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseragaman di dalam variasi model dan menyebabkan error mejadi tidak konsisten.

Model penelitian yang baik adalah model penelitian yang variasinya seragam sehingga memiliki error konsisten. Pada penelitian ini heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser

Tabel 6. Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,541	20,327		1,453	,149
PAD	,055	,030	,236	1,842	,068
Dana Perimbangan	,023	,025	,119	,933	,353

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan tabel 6. Di atas terlihat tingkat signifikansi seluruh variabel $> 0,05\%$ ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

3. Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Range nilainya adalah 0 sampai 1, apabila nilai R² kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya apabila R² besar (mendekati nilai 1) berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

Tabel 7. Uji Koefisien determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,545	,537	80,74708

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen, yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara individual terhadap variabel dependen, yaitu belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan tahun 2016-2020.

Dalam uji ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k-1), dimana n adalah jumlah sampel pengamatan dan k adalah jumlah variabel independen. Untuk tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau $\alpha = 5\%$.

Derajat kebebasannya $120 - 2 - 1 = 117$, maka t tabel yang diperoleh adalah 1,98045.

Keputusan uji parsial hipotesis dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika P Value < 0,05 atau t-hitung > t-tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa ada pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
2. Jika P Value > 0,05 atau t-hitung < t-tabel, maka H_a ditolak dan H₀ diterima, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Adapun hasil uji parsial dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	79,814	33,755		2,364	,020
PAD	,202	,050	,371	4,047	,000
Dana Perimbangan	,190	,041	,422	4,607	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 8. dapat dijelaskan masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Variabel Independen X1 (Pendapatan Asli Daerah)

Dari hasil uji parsial (uji t), diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sebesar 0,202 berarah positif, sehingga dapat

dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki hubungan positif terhadap belanja modal (Y).

Nilai sig untuk pendapatan asli daerah adalah 0,000. Nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan variabel X1 mempunyai t hitung yakni 4,047 dengan t tabel 1,98045. Jadi $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. maka terdapat pengaruh signifikan.

b. Variabel Independen X2 (Dana Perimbangan)

Dari hasil uji parsial (uji t), diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan (X2) adalah sebesar 0,190 berarah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa dana perimbangan (X2) memiliki hubungan positif terhadap belanja modal (Y). Nilai sig untuk struktur aset adalah 0,000. Nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau $0,000 < 0,05$ dan variabel X2 mempunyai t hitung yakni 4,607 dengan t tabel 1,98045. Jadi $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka terdapat pengaruh signifikan.

b. Uji Moderating

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, ada kemungkinan dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model statistik, yang disebut dengan istilah variabel moderator atau moderating. Variabel moderating adalah variabel independen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat mampukah pertumbuhan ekonomi di jadikan sebagai variabel moderating dalam model penelitian ini maka dapat dilihat berdasarkan interaksinya terhadap model penelitian dalam tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Moderating

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,083	44,378		,205	,838
PAD	,410	,156	,753	2,628	,010
Dana Perimbangan	,262	,058	,583	4,552	,000
X1Z	,002	,002	,479	1,024	,308
X2Z	-,003	,001	-,996	-2,100	,038

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji moderating pada tabel 9, hasil uji moderasi PAD dan Pertumbuhan Ekonomi (X1*Z) pada Belanja Modal nilai signifikansi yang didapat ialah 0,308 di mana nilai tersebut $> 0,05$. Artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu menguatkan ataupun melemahkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal. Sedangkan hasil uji moderasi Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi (X2*Z) pada Belanja Modal. Hasilnya nilai t hitung pada variabel X2*Z menunjukkan pengaruh negatif yaitu -2,100 dengan nilai signifikansi 0,038. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau ($0,038 < 0,05$) sehingga disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan dana perimbangan terhadap belanja modal tapi berpengaruh negatif.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal secara parsial dan secara moderasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan tahun 2016-2020.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian Hipotesis pertama atau H1 diterima. Hal ini dapat di artikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan alokasi untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pemasukan ke kas daerah.

[Ermasova dkk \(2014\)](#) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan ditentukan oleh kondisi sumber daya daerah terkait. Semakin tinggi suatu daerah memperoleh pendapatan asli daerah, maka akan semakin tinggi pula akokasi belanja modal yang dimiliki. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Hasil penelitian sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Adytama \(2015\)](#) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Wandira \(2013\)](#) yang juga menyatakan hal senada. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai serta biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua menyatakan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini diketahui bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian Hipotesis kedua atau H2 diterima.

Peningkatan alokasi untuk belanja modal pemerintah daerah sangat di tentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pusat dalam hal ini dana perimbangan, sehingga bila suatu daerah mampu meningkatkan pemasukan daerah dari berbagai sumber pemasukan yang sah maka akan berdampak pula pada alokasi belanja modal yang akan semakin besar pengalokasiannya. Dana Perimbangan atau dana transfer pusat ke daerah itu memiliki fungsi dan tujuan yang salah satunya pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pembangunan pemerintah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan publik. Dana perimbangan tersebut diharapkan mampu membantu pembiayaan daerah dalam rangka untuk menyelenggarakan pembangunan daerah pada berbagai bidang antara lain;

pendidikan, kesehatan, sanitasi, ekonomi dan berbagai sarana pra sarana penunjang lainnya.

Hasil penelitian sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Sari dkk \(2018\)](#) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Maria Reka Novianti \(2013\)](#) yang juga menyatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu menjadi variabel moderasi antara hubungan pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal. Dengan demikian Hipotesis ketiga atau H3 ditolak.

Hal ini dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi sulawesi selatan tidak merata dan terjadi adanya kesenjangan masing-masing wilayah. Selain itu dapat disebabkan juga karena peningkatan pendapatan asli daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal. Selain itu juga peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah tidak sama.

Hasil penelitian ini selaras dengan [riset Adyatma dan Oktaviani \(2015\)](#) serta [Cahyaning \(2018\)](#) yang memaparkan bila Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu menguatkan ataupun melemahkan pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal. Beda halnya dengan riset [Anggi Afnisah \(2020\)](#) yang membuktikan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan dana perimbangan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu menjadi variabel moderasi antara hubungan pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal walaupun memberikan arah yang negatif (melemahkan). Dengan demikian Hipotesis keempat atau H4 diterima.

Dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka akan berkaitan dengan dana perimbangan yang diterima oleh daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka berarti penghasilan yang diterima daerah dari pendapatan asli daerah akan semakin besar, sehingga kemungkinan memperoleh dana perimbangan khususnya dana alokasi umum yang lebih tinggi dalam hal pemerataan juga akan berkurang. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi merupakan variabel pemoderasi dalam pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperlemah pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang di realisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang di tujukan untuk kepentingan publik.
2. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan. Artinya pemerintah daerah yang mendapatkan dana perimbangan yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar, hal ini karena penggunaan dana perimbangan memang di tujukan untuk membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Artinya walaupun pertumbuhan ekonomi daerah baik, akan tetapi tidak memiliki kontribusi terhadap hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja modal serta tidak dapat menjadi salah satu indikator pengalokasian pendapatan asli daerah untuk belanja modal.
4. Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi dana perimbangan terhadap belanja modal yang berpengaruh negatif dan signifikan. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan ataupun rendah, pemerintah daerah tetap akan mendapatkan dana perimbangan dengan jumlah yang berbeda-beda di setiap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu kuatir terkait tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa saran peneliti yang disampaikan adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, sebab PAD merupakan salah satu penunjang yang menentukan besar atau kecilnya alokasi untuk belanja modal.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan setiap tahun memperoleh dana transfer dari pusat berupa dana perimbangan sehingga dengan dana tersebut diharapkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal yang lebih besar porsi ketimbang untuk membiayai pengeluaran yang tidak begitu dibutuhkan atau tidak di rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
3. Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai variabel moderating dalam pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah di provinsi sulawesi selatan. Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan bagi peneliti menguji kembali variabel pemoderasi pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah baik yang ada di

provinsi sulawesi selatan ataupun pemerintah daerah dari provinsi lainnya dengan periode penelitian dan data pengamatan yang terbaru, sehingga ada perbandingan hasil dari penelitian yang peneliti telah lakukan saat ini apakah pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai variabel moderating terhadap belanja modal secara keseluruhan atau tidak.

4. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harusnya dibarengi dengan peningkatan alokasi belanja, sebab masyarakat telah meningkatkan pembelian barang dan jasa di suatu daerah, sehingga timbal balik dari pemerintah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang aktifitas perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alvira Rahmi Syafitri, Efendri. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2014-2019).
- Djaenuri, A. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erdi, Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Husaeri Priatna dan Jaya Purwadinata. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. FE Universitas Bale Bandung.
- Jaeni; Greg. Anggana L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK. Semarang: Unisbank Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Siregar, B. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Pertama). Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siti Dini dkk. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
- Sukirno, S. (2010). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.